

**PROSES, PESAN DAN EFEK KOMUNIKASI POLITIK
ANGGOTA DPRD KOTA PADANG PERIODE 2004-2009**
(Studi Deskripsi Anggota Fraksi PKS, P. Golkar, dan PAN Pada Masa Reses
Tahun 2007 Di Daerah Pemilihan 2 Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh

HIJRATUL USJAR
BP. 03 193 032



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

HIJRATUL USJAR (03193032). Skripsi S1. Proses, Pesan Dan Efek Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Padang Periode 2004-2009 (Studi Deskripsi Anggota Fraksi PKS, P. Golkar, dan PAN Pada Masa Reses tahun 2007 Di Daerah Pemilihan 2 Kota Padang). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. 85 (delapan puluh lima) halaman, 22 (dua puluh dua) buku, 2 (dua) Skripsi S1, 1 (satu) makalah, 1 (satu) jurnal analisis politik, 2 (dua) peraturan dan UU, 5 (lima) artikel internet.

UU No. 22/ 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Padang menetapkan bahwa setiap anggota DPRD Kota Padang termasuk dari Fraksi PKS, F-P. Golkar, dan F-PAN diharuskan melakukan reses ke daerah pemilihan untuk memberikan pertanggungjawaban kerja dan kinerja pada konstituen. Reses sebagai proses komunikasi politik antara anggota dewan dan konstituen menunjukkan tanggung jawab anggota dewan terhadap rakyat yang diwakilinya. Persoalannya proses komunikasi politik anggota DPR dan DPRD pada saat reses selama ini hanya terjalin melalui ikatan partai politik sehingga terkadang pesan komunikasi politik pada konstituen tidak tercapai dalam pelaksanaan dan konstituen tidak merasakan efek komunikasi politik yang diakibatkan dari proses komunikasi politik anggota dewan saat reses di daerah pemilihan

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses, pesan dan efek komunikasi politik anggota DPRD Fraksi PKS, P. Golkar, dan PAN terhadap konstituen di daerah pemilihan 2 pada reses I tahun 2007. Pendekatan teori yang peneliti gunakan adalah teori komunikasi Harold Laswell.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk triangulasi data teknik yang dilakukan adalah dengan saling mengkonfrontir data yang didapatkan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan unit analisis individu

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses komunikasi politik yang dilakukan pada reses I tahun 2007 terbagi atas dua macam, yaitu secara kelompok dan perseorangan. Secara kelompok terbatas pada tataran camat, lurah, dan tokoh masyarakat. Secara perseorangan, dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan secara langsung pada konstituen. Pesan komunikasi politik yang disampaikan mengenai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh konstituen. Serta, perubahan cara pandang konstituen terhadap anggota dewan demi referensi pemilu mendatang. Efek komunikasi politik yang dihasilkan hanya terjadi dari penambahan pengetahuan konstituen. Namun tidak diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku politik secara langsung.

Kata kunci : reses, konstituen, proses komunikasi politik, pesan komunikasi politik, dan efek komunikasi politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakyat, memberi peluang kepada mereka untuk mengambil peran dalam diskursus pembuatan kebijakan publik¹. Sehingga, demokrasi dapat diterjemahkan sebagai pemerintahan yang memahami kemauan-kemauan para pemilihnya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan bisa mempertanggungjawabkan segala usaha dan tindakannya dihadapan para pemilihnya².

Pada awal perkembangannya demokrasi terbagi atas dua, yaitu : demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara secara langsung menjalankan hak untuk membuat keputusan-keputusan politik. Sedangkan demokrasi tidak langsung bersifat perwakilan³.

Dalam dunia modern, demokrasi menyiratkan pemerintahan perwakilan. Dinyatakan dengan memilih wakil-wakil yang kemudian bertanggung jawab

¹ Afan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, dalam kata pengantar

² Dra. Ranny Emilia, M.Phil, *Kestapan masyarakat Daerah dalam Pemilu 2004*, Seminar nasional Asosiasi Ilmu politik Indonesia di Bukittinggi tanggal 16 Agustus 2003.

³ Miriam Budihardjo, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 53-54.

untuk membuat dan mengelola atau mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan umum pada rakyat. Di Indonesia, pemerintahan perwakilan terbentuk dalam badan legislatif dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR sebagai pemerintahan perwakilan di Indonesia serupa dengan "*House of Representative*" (Amerika Serikat), "*Assemble National*" (Perancis), "*House of Commons*" (Inggris), atau "*Tweede Kamer*" (Belanda). DPR merupakan wakil langsung seluruh rakyat. Anggota DPR dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam badan legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam badan eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.⁴

Pemilihan umum (Pemilu) 5 April 2004 merupakan kali pertama Indonesia mengadopsi sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Pemilu Legislatif 2004 menggunakan tata cara baru hal penetapan daerah pemilihan (biasa disingkat dengan DP atau Dapil). Dapil diartikan sebagai wilayah kompetisi bagi seluruh anggota Dewan untuk meraih suara. Dalam hal ini untuk memilih anggota DPR daerah pemilihannya adalah provinsi, untuk memilih anggota DPRD Provinsi daerah pemilihannya

⁴ Lucianus Taelgat, 2006. *Perilaku Memilih (Voting Behavior) Masyarakat Mentawai Pada Pemilu Legislatif 2004*, Skripsi S1, Padang : FISIP Universitas Andalas, hlm.1.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Salah satu hal yang dapat dilakukan anggota Dewan untuk komunikasi yang baik dengan rakyat adalah mengefektifkan kegiatan anggota legislatif selama masa reses melalui dialog-dialog langsung dengan berbagai elemen konstituen atau masyarakat di daerah pemilihan.

Masa reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota dewan di Indonesia termasuk anggota DPRD Kota Padang. Reses sebagai proses komunikasi politik antara anggota dewan dan konstituen menunjukkan tanggung jawab anggota dewan terhadap rakyat yang diwakilinya di lembaga. Peneliti melihat reses sebagai proses komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan tentang politik dari pemerintah pada masyarakat dan dari masyarakat pada pemerintah melalui saluran tertentu yang mengakibatkan efek tertentu pada masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan rumusan Laswell yang menyatakan bahwa untuk menjelaskan komunikasi politik yaitu dengan menjawab pertanyaan *"who says what in what channel to whom with what effect"*. Dimana rumusan Laswell ini bersifat komunikasi linier atau satu arah. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, proses komunikasi politik yang dilakukan pada reses 1 tahun 2007 terbagi atas dua macam, yaitu secara kelompok dan perseorangan. Proses komunikasi politik secara kelompok yang dilakukan anggota DPRD hanya terbatas pada tataran camat, lurah, dan tokoh masyarakat tidak kepada masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Teori :

- Arifin, Anwar. 1998. *Ilmu Komunikasi : Sebagai Pengantar Ringkas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik : potret manusia Indonesia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Blake, Reed H. dan Edwin O. Haroldsen, 2005. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya : Papyrus.
- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR : Dalam era pemerintahan modern-industrial*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi : Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.